

ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya perikanan merupakan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nelayan kecil masih menghadapi keterbatasan modal, pendapatan tidak stabil, dan akses kebijakan yang terbatas, sehingga subsidi perikanan menjadi instrumen negara kesejahteraan di tingkat daerah. Permasalahan penelitian ini kewenangan pengaturan subsidi perikanan serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kewenangan tersebut terhadap kesejahteraan nelayan kecil. Manfaat penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan menjadi bahan evaluasi kebijakan subsidi perikanan daerah.

Metode penelitian yang digunakan pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan evaluatif. Data yang digunakan berupa data sekunder, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi perikanan di Kabupaten Jepara dilaksanakan dalam kerangka pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan fokus pada pemberdayaan nelayan kecil. Bentuk subsidi yang diberikan meliputi subsidi BBM, sarana dan prasarana perikanan, serta asuransi nelayan. Pelaksanaannya mencakup pendataan, fasilitasi administrasi, dan implementasi program bantuan. Meskipun didukung oleh keberadaan kelompok nelayan, prosedur berbasis aplikasi, serta tingginya kebutuhan terhadap subsidi, kesejahteraan nelayan kecil masih menghadapi berbagai keterbatasan. Hambatan yang ditemukan antara lain ketidaksinkronan regulasi, keterbatasan pemanfaatan teknologi, dan keterbatasan anggaran. Upaya perbaikan dilakukan melalui penguatan kelompok nelayan, peningkatan sosialisasi dan pembinaan, serta koordinasi lintas instansi dan lembaga nonpemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan pelaksanaan subsidi telah berjalan sesuai kerangka kewenangan yang berlaku, namun masih memerlukan optimalisasi melalui harmonisasi pengaturan dan peningkatan pendampingan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata kunci: Dinas Perikanan; Kesejahteraan Nelayan; Subsidi Perikanan; Kabupaten Jepara.